

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Tempat Pemrosesan Akhir Bakung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**RICO CHRISTIAN PREMINTA TARIGAN
NPM 2216021073**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY BY THE ENVIRONMENTAL AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY (A CASE STUDY OF BAKUNG FINAL PROCESSING SITE, BANDAR LAMPUNG CITY, LAMPUNG PROVINCE)

By

RICO CHRISTIAN PREMINTA TARIGAN

This study aims to analyze the implementation of waste management policy by the Environmental Agency of Bandar Lampung City at the Bakung Final Processing Site (TPA Bakung), particularly in leachate management and environmental risk control. The background of this study is based on the dominance of the open dumping method, the not yet optimal implementation of controlled landfill, and leachate pollution issues that potentially cause environmental impacts and public health problems. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The analysis applies George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as well as Ivan Pavlov's stimulus-response theory as a supporting theory. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation involving officials of the Environmental Agency of Bandar Lampung City, TPA Bakung managers, surrounding communities, academics, and civil society organizations.

The results of the study indicate that the implementation of waste management policy at TPA Bakung has not been optimal. In the communication aspect, technical guidelines for leachate management have not been clearly conveyed and still rely on verbal instructions. In the resource aspect, limited facilities, human resource capacity, and inadequate leachate treatment infrastructure have hindered pollution control efforts. In the disposition aspect, policy implementers tend to respond reactively to emerging environmental issues. Meanwhile, in the bureaucratic structure aspect, weak inter-agency coordination, fragmented authority, and ineffective environmental monitoring systems were still found. These conditions have caused the implementation of waste management policy at TPA Bakung to focus more on operational waste handling rather than strengthening a preventive and sustainable environmental control system.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Leachate, Environmental Risk, TPA Bakung.*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BAKUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

RICO CHRISTIAN PREMINTA TARIGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung, khususnya dalam pengelolaan air lindi dan pengendalian risiko lingkungan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih dominannya metode open dumping, belum optimalnya penerapan controlled landfill, serta persoalan pencemaran air lindi yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta teori stimulus-respon Ivan Pavlov sebagai teori pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pengelola TPA Bakung, masyarakat sekitar, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung masih belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, pedoman teknis pengelolaan air lindi belum tersampaikan secara jelas dan masih bergantung pada arahan lisan. Pada aspek sumber daya, keterbatasan fasilitas, kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya sarana pengolahan air lindi menyebabkan pengendalian pencemaran belum berjalan maksimal. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan cenderung bersikap reaktif terhadap persoalan lingkungan yang muncul. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan lemahnya koordinasi antarinstansi, fragmentasi kewenangan, dan belum optimalnya sistem pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung masih lebih berorientasi pada penanganan operasional sampah dibanding penguatan sistem pengendalian lingkungan yang preventif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Air Lindi, Risiko Lingkungan, TPA Bakung.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Tempat Pemrosesan Akhir Bakung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung)**

Oleh

RICO CHRISTIAN PREMINTA TARIGAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Tempat
Pemrosesan Akhir Bakung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasuswa

: **Rico Christian Preminta Tarigan**

NPM

: **2216021073**

Program Studi

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Himawan Indrajat, S.I.P., M. Si.

NIP. 19830772009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.

NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1 Tim Penguji

Ketua

: **Himawan Indrajat, S.IP., M. Si.**



Penguji

: **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **2 Juni 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Rico Christian Preminta Tarigan
NPM 2216021073

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rico Christian Preminta Tarigan, dilahirkan di Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2004, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDS Tunas Bangsa. Pendidikan menengah diselesaikan di SMP Negeri 25 Kota Bekasi dan pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA

Negeri 20 Kota Bekasi Pada tanggal 23 Juni 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai Kadiv Fotografi pada UKM-F Lembaga Penerbitan Mahasiswa Republica.

Penulis juga aktif dalam kegiatan advokasi lingkungan hidup bersama WALHI Lampung melalui program magang yang dijalani pada tahun 2025. Sebagai bagian dari kegiatan akademik, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Ratu sebagai Koordinator Desa. Serta melaksanakan program magang di WALHI Lampung. Setelah menyelesaikan program magang, penulis tetap aktif sebagai volunteer dalam berbagai kegiatan dan kampanye bersama WALHI Lampung.

MOTTO

**“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala
rencanamu**

(Amsal 16:3)

“Aku percaya setiap proses yang kulalui bukan terjadi secara kebetulan.

**Dalam banyak kegagalan, keraguan, dan keterbatasan, Tuhan selalu
menghadirkan jalan untuk tetap bertahan dan melangkah. Mustahil Tuhan
membawaku sejauh ini hanya untuk berhenti di tengah jalan. Sebab aku
yakin, setiap usaha yang diserahkan kepada Tuhan akan menemukan
waktunya untuk berhasil.”**

(Penulis, Rico Christian Preminta Tarigan)

**"Tertulis jelas namaku di setiap harap malammu. Tentang masa depan,
tentang masa terang, warisan akal budi gemilang."**

(Gemilang,Perunggu)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, penyertaan, dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini.

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayah Gidion Tarigan dan Ibu Lina Pinem

Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung. Kalian adalah sumber kekuatan dan alasan penulis untuk terus berjuang hingga sampai pada titik ini.

Adik Rian Tarigan dan Natasya Tarigan

Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu menyertai langkah penulis.

Kawan-kawan seperjuangan

Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita perjuangan yang telah dilalui bersama.

Almamater tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan proses yang telah membentuk penulis hingga saat ini.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BAKUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG)”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang ditempuh sendirian. Terdapat banyak tangan yang membantu, banyak doa yang menguatkan, dan banyak hati yang tulus mendukung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung**, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta bertumbuh dalam lingkungan akademik Universitas Lampung.
2. **Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**, yang telah memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk berkembang secara intelektual maupun organisatoris.
3. **Ibu Tabah Maryanah ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**, yang telah memberikan arahan serta mendukung proses akademik penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. **Bapak Himawan Indradjat S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi**, yang bukan hanya menjadi pembimbing dalam arti akademik, tetapi juga menjadi sosok yang dengan penuh kesabaran membentuk cara berpikir penulis menjadi lebih sistematis, kritis, dan terarah. Terima kasih atas waktu, ilmu, perhatian, serta kesediaan Bapak dalam membimbing

penulis, bahkan di saat penulis sendiri terkadang meragukan kemampuannya. Setiap arahan dan masukan Bapak merupakan bagian penting yang mengantarkan penulis hingga sampai pada titik ini.

5. **Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi**, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang tajam, objektif, dan membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, lebih matang, dan lebih layak secara akademik.
6. **Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual penulis, memberikan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai yang akan terus melekat dalam kehidupan penulis
7. **Seluruh Keluarga Besar Walhi Lampung**, yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama proses penelitian dan magang.
8. **Ayah Gidion Tarigan dan Ibu Lina Pinem**, dua manusia hebat yang menjadi rumah pertama dan tempat pulang terbaik bagi penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah ditunjukkan, dan cinta yang tidak pernah meminta balasan. Skripsi ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik setiap harapan yang Ayah dan Ibu titipkan dalam setiap doa.
9. **Adik Rian Tarigan dan Natasya Tarigan**, yang selalu menjadi bagian dari alasan penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
10. **Bi Grace dan Pa uda**, yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
11. **Helfrida Yulianti Butar Butar**, yang telah banyak membantu, mendukung, dan menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

12. **Relawan Ruhan Team: Ardi Ruhan, Adib, Andika, Ikhsan, Ilham, Febri, Fikri, dan Nanda**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak hanya membentuk penulis secara organisatoris, tetapi juga secara mental dan emosional. Terima kasih atas kebersamaan, loyalitas, dan cerita yang tidak selalu masuk akal, tetapi selalu bermakna. Kalian adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan dan tertawa bahkan ketika keadaan tidak mudah. Bersama kalian, penulis belajar bahwa kadang yang dibutuhkan untuk tetap waras di tengah skripsi bukan jawaban, tapi teman yang sama-sama tidak tahu jawabannya.
13. **Gofars**, yang memberikan dukungan, bantuan, dan suasana yang menyenangkan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
14. **Grup Seng Seng**, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan menjadi bagian dari perjalanan bertumbuh penulis.
15. **Alam dan Taufik**, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan menjadi bagian dari perjalanan bertumbuh penulis.
16. **Tim KKN Desa Banjar Ratu**, yang telah memberikan pengalaman, pelajaran, dan kenangan yang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
17. **Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu**, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, skripsi ini adalah bukti bahwa dengan doa, dukungan, dan keteguhan, setiap perjalanan sepanjang dan seberat apa pun akan selalu menemukan akhirnya.

Penulis

Rico Christian Preminta Tarigan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Definisi Implementasi	13
2.1.1 Implementasi Kebijakan	15
2.1.2 Teori Implementasi	16
2.1.3 Teori Stimulus–Respon Ivan Pavlov	17
2.2 Konsep Pengelolaan Sampah	19
2.4 Konsep Air Lindi	21
2.5 Manajemen Risiko Lingkungan	24
2.6 Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	25
2.7 Kerangka Pemikiran	27
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Sumber Data	32
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6.1 Observasi	34
3.6.2 Wawancara	35
3.6.3 Dokumentasi	36
3.7 Teknik Analisis Data	37
3.7.1 Reduksi Data	37
3.7.2 Penyajian Data	37
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	37
3.8 Teknik Validasi Data	38
3.8.1 Kredibilitas	38
3.8.2 Transferabilitas	38

IV. GAMBARAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	39
4.2 Gambaran Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Bakung	40
4.3 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di TPA Bakung	42
4.3.1 Komunikasi	43
4.3.2 Sumber Daya	63
4.3.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana	90
4.3.4 Struktur Birokrasi	102
4.4 Analisis Stimulus-Respon Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bakung	112
4.4.5 Analisis Stimulus-Respon	124
4.5 Analisis Risiko Lingkungan dan Pengelolaan Air Lindi	129
4.5.1 Kondisi Pengelolaan Air Lindi di TPA Bakung	129
4.5.2 Analisis Risiko Lingkungan Akibat Air Lindi	133
4.5.3 Analisis Hasil Uji Laboratorium Air Lindi	139
4.5.4 Dampak Air Lindi terhadap Masyarakat Sekitar	143
4.5.5 Analisis Manajemen Risiko Lingkungan	147
4.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bakung	152
V. SIMPULAN DAN SARAN	160
5.1 Simpulan	160
5.2 Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2. Informan Penelitian	33
Tabel 3. Triangulasi Dimensi Komunikasi	61
Tabel 4. Data Fasilitas dan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	65
Tabel 5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandar Lampung	72
Tabel 6. Triangulasi Dimensi Sumber Daya	87
Tabel 7. Triangulasi Disposisi	100
Tabel 8. Triangulasi Struktur Birokrasi	110
Tabel 9. Analisis Ringkas Stimulus–Respon	129
Tabel 10. Kondisi Pengelolaan Air Lindi di TPA Bakung	132
Tabel 11. Perbandingan Kondisi TPA Bakung dengan Standar Pengelolaan	138
Tabel 12. Evaluasi Hasil Uji Laboratorium Air Lindi TPA Bakung	143
Tabel 13. Dampak Air Lindi terhadap Masyarakat Sekitar TPA Bakung	147
Tabel 14. Analisis Manajemen Risiko Lingkungan di TPA Bakung	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data SIPSN 2024.	1
Gambar 2. Hasil Uji Lab Oleh Konsentris.	5
Gambar 3. Kerangka Pikir.	30
Gambar 4. Instruksi Teknis DLH Bandar Lampung: Implementasi Perda Pengelolaan Sampah No. 6/2023	44
Gambar 5. Dokumentasi administrasi forum Lintas Sektoral (Linsek)	52
Gambar 6. Dokumentasi penyuluhan kesehatan oleh Puskesmas Bakung.	53
Gambar 7. Dokumentasi Pembersihan Kolam Lindi.	58
Gambar 8. Dokumentasi pencemaran drainase warga akibat luapan lindi dan anomali cuaca di wilayah sekitar TPA.	59
Gambar 9. Kondisi tumpukan sampah di TPA.	65
Gambar 10. Kondisi infrastruktur kolam penampungan air lindi di TPA Bakung.	73
Gambar 11. Dokumentasi Alat Berat di Tpa Bakung.	74
Gambar 12. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.	83
Gambar 13. Struktur Organisasi UPT TPA Bakung.	84
Gambar 14. Foto Pemeriksaan Kesehatan Pemulung.	86
Gambar 15. Foto Catatan Sampah Per 2 Hari.	98
Gambar 16. Pencemaran drainase permukiman warga akibat luapan air lindi TPA Bakung	113
Gambar 17. Hasil uji laboratorium air lindi TPA Bakung	114
Gambar 18. Kondisi lingkungan masyarakat di sekitar TPA Bakung	116
Gambar 19. Surat Edaran oleh DLH Kota Bandar Lampung	119
Gambar 21. Penerapan sistem controlled landfill di TPA Bakung	122
Gambar 22. Kolam penampungan air lindi di TPA Bakung	130
Gambar 23. Penataan sampah dalam operasional TPA Bakung	130
Gambar 24. Drainase di sekitar TPA Bakung yang tercemar air lindi	134
Gambar 25. Penyevelan TPA Bakung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	135
Gambar 26. Hasil uji laboratorium air lindi TPA Bakung	140
Gambar 27. Kondisi lingkungan masyarakat di sekitar TPA Bakung	144
Gambar 28. Penyerahan bantuan kepada masyarakat sekitar TPA Bakung	146

DAFTAR SINGKATAN

BLE	: Berbasis Lingkungan dan Edukasi
BPS	: Badan Pusat Statistik
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kesling	: Kesehatan Lingkungan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Linsek	: Lintas Sektoral
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
PLTSa	: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	: Tempat Penampungan Sementara
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPSN	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia dan belum menemukan solusi yang menyeluruh. Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang saling memengaruhi. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, total timbulan sampah nasional mencapai 34.214.607,36 ton per tahun, dengan hanya 13,24% yang berhasil dikurangi dan 46,51% yang ditangani. Sisanya, sekitar 40,26%, belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih menghadapi kesenjangan signifikan antara timbulan dan kapasitas penanganan.



Gambar 1. Data SIPSN 2024.
Sumber: SIPSN 2024

Untuk menanggapi kompleksitas tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta standar teknis SNI 19- 2454-2002 mengenai tata cara pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Regulasi ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.

Selain pengelolaan teknis di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), paradigma pengelolaan sampah modern juga menekankan pentingnya penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai bagian dari pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Prinsip ini menjadi pendekatan utama dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan karena mampu mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke TPA sekaligus meminimalkan dampak pencemaran lingkungan. Konsep 3R juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.

Dalam konteks internasional, pengelolaan sampah yang baik juga diarahkan pada penerapan *sanitary landfill* dan sistem pengendalian pencemaran lingkungan sebagaimana tercermin dalam standar pengelolaan lingkungan ISO 14001 dan konsep *Integrated Solid Waste Management (ISWM)*. Sistem tersebut menekankan pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi juga pada pengurangan risiko lingkungan, pengolahan air lindi, pengendalian emisi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap tantangan implementasi tersebut, beberapa daerah mengembangkan pendekatan inovatif dalam pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sampah. Kabupaten Banyumas, misalnya, menginisiasi Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. TPA BLE tidak sekadar berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir, tetapi juga menggabungkan aspek teknis dan sosial melalui pelibatan kader lingkungan, produksi kompos, serta fasilitas edukatif seperti taman lingkungan dan rumah kompos. Penelitian Islamiati (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan di Banyumas memperkuat keberlanjutan pengelolaan sampah. Namun, konteks tiap daerah berbeda sehingga implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas teknis dan karakteristik kawasan.

Di Kota Bandar Lampung, tantangan implementasi terlihat dari meningkatnya timbulan sampah setiap tahun. Berdasarkan data BPS 2024, timbulan sampah Kota Bandar Lampung mencapai 317.550 ton per tahun, seluruhnya dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung di Kecamatan Teluk Betung Timur. TPA Bakung memiliki luas sekitar 16,5 hektare dan menampung sampah dari 20 kecamatan dengan metode pengelolaan yang masih didominasi open dumping. Pemerintah Kota telah mulai menerapkan sistem *controlled landfill*, namun menurut RMOL Lampung (2025), penerapannya baru mencakup ± 3 hektare dari keseluruhan area, sehingga sebagian besar zona TPA masih beroperasi dengan teknik lama.

Pengelolaan sampah modern tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan dan pembuangan akhir sampah, tetapi juga menekankan penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R). Konsep 3R bertujuan mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya sehingga jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat diminimalkan. *Reduce* dilakukan melalui upaya pengurangan penggunaan barang yang menghasilkan sampah, *reuse* dilakukan dengan penggunaan kembali barang

yang masih layak pakai, sedangkan *recycle* dilakukan melalui proses daur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh pola pengangkutan dan penumpukan sampah di TPA Bakung sehingga penerapan konsep 3R belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat dan berdampak pada bertambahnya timbulan air lindi serta risiko pencemaran lingkungan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual pengelolaan sampah di TPA Bakung dengan standar pengelolaan sampah yang diatur dalam SNI 19-2454-2002 maupun konsep *sanitary landfill* yang direkomendasikan secara nasional dan internasional. Secara normatif, pengelolaan TPA diarahkan menggunakan metode *sanitary landfill* atau *controlled landfill* yang dilengkapi sistem pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk pengelolaan air lindi dan pengurangan timbulan sampah berbasis 3R. Namun, pada praktiknya sebagian besar area TPA Bakung masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, sehingga potensi pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan volume air lindi yang sangat besar dan dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Air lindi merupakan cairan berwarna hitam pekat hasil pembusukan sampah yang mengandung padatan tersuspensi, amonia, bakteri patogen, serta logam berat seperti kadmium dan timbal. Apabila tidak dikelola dengan baik, air lindi dapat meresap ke tanah, mencemari sumur warga, mengalir ke sungai, dan menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam konteks TPA Bakung, kekhawatiran ini diperkuat oleh hasil uji laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (10 Januari 2025) atas sampel yang dikumpulkan oleh Konsentris.id. Hasil pengujian menunjukkan

bahwa beberapa parameter melebihi baku mutu: pH mencapai 9,25 (batas 6–9), *Total Suspended Solid* (TSS) sebesar 205 mg/l (batas 30 mg/l), Amonia 2,28 mg/l, serta kandungan Kadmium 0,007 mg/l. Nilai-nilai tersebut mencerminkan belum optimalnya pengelolaan air lindi dan menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Bakung tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengangkutan dan penumpukan sampah, tetapi juga berkaitan dengan risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Air lindi yang tidak dikelola secara optimal berpotensi mencemari tanah, air permukaan, dan sumber air masyarakat sekitar. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan bau lingkungan, pencemaran udara, berkembangnya bakteri patogen, hingga potensi longsoran sampah akibat tingginya akumulasi timbunan sampah di area TPA. Dalam perspektif manajemen risiko lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menghadapi tantangan dalam upaya mitigasi dan pengendalian dampak pencemaran secara berkelanjutan.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
UPD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Dr. Soetrisno No. 102, Pabelan, Bandar Lampung 35112
Telp. (071) 701452 - 702142, Faks. (071) 7036514, 0811 7036522, 0811 7036523
Email: lab@balai-lab.lampung.go.id, info@balai-lab.lampung.go.id

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

Informasi Pelanggan	Informasi Sampel	Informasi Pengujian
1.1 Nama	1.2 Nomor	1.3 No. Reg.
1.4 Alamat Pengirim Sampel	2.1 Nomor Pendaftaran	2.2 Jenis Sampel
	2.3 Nama	2.4 Jumlah dan Jenis
	2.5 Media / Volume	2.6 Tanggal Pengiriman Sampel
	2.7 Tanggal Terima Sampel	2.8 Tanggal Pengiriman Sampel
	2.9 Tanggal Selesai Pengujian	

Parameter	Hasil Pengujian	Standar Baku Mutu (Kadar Maksimum yang Diperbolehkan)	Satuan	Referensi
pH	9,25	6,0 - 9,0	-	SN 15-10-2005, 20-2-2005
pH (Ekstrem Keras)	9,25	8,0 - 9,0	-	SN 15-10-2005, 20-2-2005
Zat Terlarut (TSS)	205	30	mg/l	SN 15-10-2005, 20-2-2005
Kadmium (Cd)	0,007	0,005	mg/l	SN 15-10-2005, 20-2-2005

Catatan:

- Pengiriman sampel harus disertai dengan formulir pengujian yang terlampir.
- Lampiran hasil pengujian harus disertai dengan label yang menunjukkan nomor pendaftaran sampel dan tanggal uji.
- Hasil yang disampaikan hanya berdasarkan data yang tertera pada formulir uji.
- Hasil dan informasi ini hanya berlaku untuk sampel yang dikirimkan.

Pengirim: UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
Penerima: UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
Penerima: UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 11 Januari 2025
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
Pengirim: [Signature]

Wita Satrio, S ST, M Sc
Kep. Laboratorium Kesehatan

Gambar 2. Hasil Uji Lab Oleh Konsentris.

Sumber: UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung, 2025

Temuan terkait air lindi ini sejalan dengan studi Zahra dan Damanhuri (2023) yang menunjukkan bahwa banyak TPA di Indonesia menghadapi kesenjangan antara kapasitas instalasi pengolahan lindi dengan volume aktual lindi yang dihasilkan. Keterbatasan teknis operator dan lemahnya pengawasan rutin menyebabkan sistem pengolahan lindi sering tidak berjalan sesuai standar. Kondisi tersebut relevan dengan situasi TPA Bakung yang masih menghadapi kendala implementasi dalam pengendalian pencemaran air lindi.

Selain itu, hasil penelitian Ulfa Umayasari dan Theo Reynol Sandy (2024) mengenai TPA Bakung menunjukkan bahwa berbagai upaya strategis pemerintah, termasuk perbaikan sistem pengolahan sampah dan lindi, masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, serta belum optimalnya fasilitas teknis seperti drainase lindi dan area penampungan lindi. Temuan ini bukan merupakan evaluasi efektivitas kebijakan, tetapi memberikan gambaran konteks implementasi yang dihadapi DLH dalam menjalankan kewajiban pengelolaan air lindi.

Perspektif implementasi diperkuat oleh penelitian Khotimah (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan dan kapasitas sumber daya manusia. Faktor-faktor ini berhubungan erat dengan pengelolaan air lindi yang membutuhkan kejelasan instruksi teknis dan kompetensi operator. Sementara itu, penelitian Hardiana, Susanti, dan Hamid (2024) di Kota Palu menunjukkan bahwa keterbatasan sarana prasarana dan minimnya jangkauan pelayanan menyebabkan pelaksana kebijakan kesulitan menjalankan mandat pengelolaan sampah secara optimal. Kondisi ini relevan dengan tantangan implementasi kebijakan di TPA Bakung

Dalam merespons persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pada BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan air lindi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Pasal-pasal dalam Perda juga mengatur pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang mengharuskan penggunaan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter, atau teknologi ramah lingkungan yang seluruhnya menjadi syarat dalam memperkuat sistem pengelolaan air lindi.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan berupa keterbatasan *controlled landfill*, belum optimalnya fasilitas teknis pendukung lindi, serta sistem pengelolaan lindi yang belum memenuhi standar menunjukkan adanya tantangan implementatif dalam menerjemahkan mandat Perda 6/2023 ke praktik operasional.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada strategi pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 terhadap pengelolaan air lindi dan risiko lingkungan di TPA Bakung masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya belum mengaitkan implementasi kebijakan dengan pendekatan stimulus–respon dalam melihat respons pemerintah daerah terhadap tekanan lingkungan, kondisi pencemaran, dan kritik masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap

pengelolaan air lindi dan risiko lingkungan di TPA Bakung Kota Bandar Lampung.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada pengelolaan air lindi di TPA Bakung sebagai aspek yang memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan, meliputi aspek administratif, teknis, dan koordinatif, tanpa melakukan evaluasi terhadap capaian atau efektivitas kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh sejumlah kajian ilmiah sebelumnya yang memperlihatkan beragam tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Hardiana, Susanti, dan Hamid (2024) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan di Kota Palu menghadapi kendala pada kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lemahnya jangkauan pelayanan, yang seluruhnya berdampak pada proses implementasi kebijakan.

Kondisi serupa juga terlihat dalam temuan Ulfa Umayasari dan Theo Reynol Sandy (2024) mengenai TPA Bakung, yang menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah berkelanjutan masih terhambat oleh minimnya anggaran, kurang optimalnya infrastruktur, serta belum memadainya fasilitas pengolahan limbah, termasuk sistem pengolahan air lindi yang rentan mencemari lingkungan.

Perspektif implementasi semakin diperkuat oleh studi Zahra dan Damanhuri (2023) yang mengungkapkan bahwa berbagai TPA di Indonesia menghadapi ketidaksesuaian antara kapasitas instalasi pengolahan air lindi dengan volume lindi yang dihasilkan. Keterbatasan teknis operator serta lemahnya pengawasan rutin turut menjadi isu yang menyebabkan sistem pengolahan lindi tidak berjalan sesuai standar teknis. Temuan ini relevan dengan kondisi TPA Bakung yang juga dihadapkan pada tantangan teknis dan institusional dalam memenuhi ketentuan pengolahan lindi sebagaimana diamanatkan regulasi.

Selain itu, penelitian Khotimah (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan dan kapasitas SDM pelaksana. Dua faktor ini berhubungan langsung dengan konteks pengelolaan air lindi yang memerlukan kompetensi teknis dan instruksi kebijakan yang jelas di tingkat operasional. Sementara itu, Islamiati (2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tantangan utama terdapat pada koordinasi lintas aktor dan keberlanjutan komitmen bersama— suatu kondisi yang tercermin pula dalam pengelolaan TPA Bakung yang melibatkan DLH, pengelola TPA, laboratorium, dan pemangku kepentingan lokal.

Kondisi implementasi di TPA Bakung juga tercermin dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Konsentris.id di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada 10 Januari 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air lindi belum memenuhi baku mutu. Temuan ini tidak digunakan sebagai evaluasi efektivitas kebijakan, tetapi sebagai gambaran teknis mengenai tantangan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023.

Dengan demikian, kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah termasuk pengelolaan air lindi ‘sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kemampuan komunikasi kebijakan, kapasitas SDM, serta kualitas koordinasi antaraktor. Berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di TPA Bakung, khususnya dalam aspek pengelolaan air lindi sebagai bagian dari pemrosesan akhir sampah.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, pengelolaan air lindi, serta strategi pengelolaan TPA di berbagai daerah, masih terdapat kesenjangan penelitian pada aspek implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dikaitkan dengan pengendalian risiko lingkungan, penerapan prinsip 3R, serta respons masyarakat terhadap stimulus kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah atau strategi kelembagaan, sedangkan penelitian ini berupaya melihat implementasi kebijakan secara lebih komprehensif melalui pendekatan implementasi kebijakan, manajemen risiko lingkungan, serta respons masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Temuan Utama
1	Hardiana, Susanti, & Hamid (2024)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Terhambat keterbatasan SDM dan sarana prasarana.
2	Islamiati (2024)	Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas	Kolaborasi memperkuat keberlanjutan pengelolaan sampah.

3	Khotimah (2024)	Implementasi Kebijakan DLH di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong	Komunikasi dan kapasitas SDM menentukan keberhasilan implementasi.
4	Ulfa Umayasari & Theo Reynol Sandy (2024)	Strategi Pengelolaan Sampah di TPA Bakung	Terhambat anggaran, infrastruktur, dan fasilitas pengolahan air lindi.
5	Zahra & Damanhuri (2023)	Pengelolaan Air Lindi di TPA Indonesia	Kesenjangan kapasitas pengolahan lindi dan lemahnya pengawasan.

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Dengan melihat beragam studi terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh faktor kontekstual di masing-masing daerah, baik dari aspek kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga pola komunikasi yang dijalankan. Keberagaman tantangan yang muncul menunjukkan bahwa pendekatan satu arah tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial dan struktural di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan harapan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap perbaikan tata kelola sampah di tingkat lokal secara lebih adaptif dan kontekstual.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan air lindi dan risiko lingkungan di TPA Bakung. Penelitian ini tidak hanya melihat implementasi kebijakan dari aspek administratif, tetapi juga menganalisis respons pemerintah daerah terhadap berbagai stimulus berupa regulasi, tekanan sosial, ancaman pencemaran, dan kondisi lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengimplementasikan tentang Pengelolaan Sampah di TPA Bakung, khususnya dalam pengelolaan air lindi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan air lindi di TPA Bakung oleh DLH Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menguraikan bagaimana implementasi pengelolaan air lindi di TPA Bakung, khususnya terkait pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya pada bidang implementasi kebijakan publik terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, penelitian ini menjadi referensi akademik untuk memahami pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini menyajikan informasi mengenai proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yang dapat memperluas pemahaman publik tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi menjadi sangat penting karena merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik. Menurut Birkland (2019), implementasi adalah fase krusial dalam siklus kebijakan di mana keputusan publik yang telah dibuat dilaksanakan melalui program, regulasi, dan tindakan administratif oleh lembaga pemerintah. Proses ini tidak hanya membutuhkan kapasitas teknis tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kondisi politik dan dukungan lintas sektor.

Sementara itu, Grindle (1980) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau keluaran yang nyata. Dalam pandangan mereka, masalah implementasi sering kali dianggap sebagai serangkaian keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak selalu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai penerapan atau tahap pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebelum diimplementasikannya sebuah kebijakan, terlebih dahulu harus dirancang dalam proses formulasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi lebih bersifat praktis, sedangkan formulasi lebih bersifat teoritis. Implementasi kebijakan lebih mengarah kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan dapat terjadi dan bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Jenkins (1978) menyatakan bahwa studi ini juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana sebuah organisasi, baik di luar maupun di dalam, menjalankan urusan mereka dan saling berinteraksi. Penelitian ini juga mencakup motivasi di balik tindakan mereka dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal yang berbeda. Implementasi mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sebuah keputusan. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi pola operasional yang dapat mencapai perubahan, baik kecil maupun besar, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan terhadap keputusan yang telah dibuat. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengesahan peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum bagi kebijakan, hingga pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana yang bertanggung jawab. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Dampak nyata dari keputusan, baik yang dikehendaki maupun yang tidak, harus dievaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan. Selain itu, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi pelaksana juga perlu diperhatikan, sehingga upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan dapat dilakukan.

Proses persiapan implementasi setidaknya harus mencakup beberapa hal penting. Pertama, penyiapan sumber daya, unit, dan metode yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Kedua, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak terkait. Ketiga, penyediaan layanan, pembayaran, dan hal-hal lain secara rutin agar pelaksanaan kebijakan dapat

berjalan dengan lancar. Dengan demikian, implementasi adalah proses yang dinamis dan kompleks, yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah disusun dan disahkan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Tanpa pelaksanaan yang efektif dan sistematis, kebijakan yang dirancang secara ideal pun tidak akan menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Widodo (2019) menyatakan bahwa implementasi berfungsi sebagai jembatan penghubung antara keputusan normatif dan hasil konkret yang dijalankan melalui aktivitas administratif, teknis, serta koordinasi antar lembaga pelaksana.

Dalam kajian ilmu pemerintahan, implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai proses mekanistik, tetapi juga melibatkan dinamika interaksi antar aktor, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam struktur pemerintahan. Proses ini mencerminkan bagaimana tujuan kebijakan ditafsirkan dan diwujudkan oleh para pelaksana, serta sejauh mana kapasitas kelembagaan dan sumber daya memungkinkan realisasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002) menyatakan bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tertulis dalam dokumen kebijakan. Proses ini mencakup transformasi keputusan formal menjadi program-program operasional, serta pengorganisasian sumber daya yang relevan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, melainkan juga terkait dengan nilai, norma, dan struktur birokrasi yang memengaruhi jalannya kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

2.1.2 Teori Implementasi

George C. Edwards III (1980) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan secara integral membentuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

- a. **Komunikasi:** Komunikasi merupakan proses penyampaian kebijakan dari pembuat keputusan kepada pelaksana di lapangan. Keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kejelasan informasi, konsistensi pesan yang disampaikan, serta ketepatan sasaran komunikasi. Jika informasi tidak tersampaikan dengan baik, akan muncul kesalahpahaman atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- b. **Sumber Daya:** Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, tenaga kerja, informasi, maupun fasilitas pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan mengalami berbagai hambatan. Sumber daya manusia yang terlibat harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai, sementara anggaran harus mencukupi untuk mendukung seluruh aktivitas program. Selain itu, fasilitas fisik dan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan.
- c. **Disposisi (Sikap Pelaksana):** Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan pemahaman dari para pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada motivasi dan integritas pelaksana. Apabila pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dan keinginan kuat untuk menjalankan kebijakan, maka pelaksanaan akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, apabila terdapat resistensi, rendahnya motivasi, atau sikap acuh tak acuh dari pelaksana, maka kebijakan sulit diwujudkan secara optimal.

- d. **Struktur Birokrasi:** Struktur birokrasi mencakup sistem organisasi, tata kelola, dan prosedur administratif yang menjadi kerangka kerja pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu rumit, hierarkis, dan kaku sering kali menjadi penghambat koordinasi dan pelaksanaan program. Oleh sebab itu, struktur birokrasi harus dirancang agar bersifat adaptif, responsif, dan mendukung kerja sama antar sektor. Pembagian tugas yang jelas, standar operasional prosedur yang efisien, serta koordinasi yang baik akan memperlancar proses implementasi kebijakan.

Keempat faktor tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, keberadaan komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang mendukung merupakan indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan publik di berbagai sektor.

2.1.3 Teori Stimulus–Respon Ivan Pavlov

Ivan Petrovich Pavlov (1849–1936) mengemukakan teori stimulus–respon melalui konsep classical conditioning atau pengkondisian klasik. Teori ini menjelaskan bahwa suatu perilaku atau tindakan dapat muncul akibat adanya rangsangan tertentu yang diberikan secara berulang sehingga menimbulkan respons tertentu. Pavlov membuktikan teorinya melalui percobaan terhadap anjing, di mana bunyi bel yang awalnya tidak

menimbulkan respons, setelah dipasangkan secara terus-menerus dengan makanan akhirnya mampu memunculkan respons berupa keluarnya air liur meskipun tanpa adanya makanan.

Dalam teori ini, Pavlov membagi unsur utama menjadi empat bagian, yaitu:

a. *Unconditioned Stimulus (US)*

Unconditioned Stimulus merupakan stimulus alami atau rangsangan yang secara langsung dapat menimbulkan respons tanpa proses pembiasaan terlebih dahulu.

b. *Unconditioned Response (UR)*

Unconditioned Response merupakan respons alami yang muncul akibat adanya stimulus yang tidak dikondisikan.

c. *Conditioned Stimulus (CS)*

Conditioned Stimulus merupakan stimulus yang sebelumnya tidak menimbulkan respons, namun setelah melalui proses pembiasaan dan pengulangan akhirnya mampu memunculkan respons tertentu.

d. *Conditioned Response (CR)*

Conditioned Response merupakan respons yang muncul akibat adanya stimulus yang telah dikondisikan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, teori stimulus respon tidak hanya digunakan dalam kajian perilaku, tetapi juga digunakan dalam ilmu sosial dan administrasi publik untuk melihat bagaimana individu, kelompok, maupun organisasi memberikan respons terhadap kebijakan, tekanan lingkungan, maupun kondisi sosial tertentu. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, stimulus dapat berupa regulasi, informasi, pengawasan, maupun tekanan sosial yang kemudian memunculkan respons dalam bentuk tindakan, sikap, maupun perilaku pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian ini, teori stimulus-respon digunakan sebagai teori pendukung untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dan aparat pelaksana memberikan respons terhadap berbagai stimulus dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung. Stimulus tersebut berupa regulasi kebijakan, kondisi pencemaran lingkungan, tekanan sosial masyarakat, pengawasan pemerintah, dan ancaman pencemaran akibat air lindi. Stimulus tersebut kemudian memunculkan berbagai respons pemerintah dalam bentuk pengangkutan sampah, penerapan *controlled landfill*, pembentukan bank sampah, dan penanganan dampak lingkungan. Namun demikian, respons tersebut masih belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

2.2 Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Konsep ini tidak hanya mencerminkan aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengelolaan sampah menjadi indikator penting dari kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keamanan, dan keselamatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap kehidupan sosial dan ekosistem.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sampah modern adalah prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). *Reduce* merujuk pada upaya pengurangan produksi sampah sejak dari sumbernya. *Reuse* menekankan penggunaan ulang terhadap bahan atau produk yang masih dapat digunakan. Sementara *Recycle* mengacu pada proses daur ulang sampah agar menjadi barang baru yang bernilai guna. Ketiga pendekatan ini membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan rumah tangga.

Secara operasional, pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis seperti SNI 19-2454-2002 yang memuat standar tata cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penguatan sistem pengelolaan ini juga didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi basis data nasional terkait timbulan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada konsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan pengelolaan sampah perlu didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan pengelolaan sampah perlu didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat.

2.3 Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan pendekatan utama dalam pengelolaan sampah modern yang bertujuan mengurangi jumlah timbulan sampah sejak dari sumbernya. Pendekatan ini dikembangkan sebagai upaya

untuk menekan ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah. *Reduce* merupakan upaya mengurangi penggunaan barang atau material yang berpotensi menghasilkan sampah. Pendekatan ini menekankan perubahan pola konsumsi masyarakat agar lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah berlebihan. *Reuse* adalah kegiatan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai tanpa melalui proses pengolahan, sedangkan *recycle* merupakan proses mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Dalam implementasinya, konsep 3R membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, pengolahan kompos, serta edukasi lingkungan secara berkelanjutan. Penerapan konsep 3R juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan timbulan sampah dan keberlanjutan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia, penerapan konsep 3R masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta dominannya pola pengelolaan sampah yang masih berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan akhir.

2.4 Konsep Air Lindi

Air lindi (*leachate*) merupakan cairan yang terbentuk dari hasil perkolasi air hujan atau cairan lain yang meresap melalui timbunan sampah dan membawa berbagai zat terlarut dari sampah tersebut. Secara konseptual, air lindi adalah salah satu komponen paling kritis dalam pengelolaan sampah karena memiliki potensi mencemari tanah, air permukaan, dan air tanah

apabila tidak dikelola secara memadai. Air lindi mengandung parameter pencemar seperti amonia, BOD, COD, logam berat, klorida, hingga bakteri patogen yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif kesehatan lingkungan, keberadaan air lindi yang tidak dikendalikan dapat menjadi sumber penyakit berbasis lingkungan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Air lindi dapat meresap ke tanah, masuk ke sumur warga, atau mengalir ke badan air permukaan sehingga memicu gangguan kesehatan seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, hingga risiko kronis akibat paparan logam berat. Oleh karena itu, pengelolaan air lindi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap pengelolaan sampah harus memperhatikan prinsip pencegahan pencemaran dan perlindungan kesehatan. Dalam konteks operasional, pengelolaan air lindi mengacu pada standar teknis nasional, termasuk penggunaan sistem *controlled landfill*, *sanitary landfill*, serta instalasi pengolahan air lindi (IPAL) yang memenuhi baku mutu lingkungan. Sistem ini dirancang untuk mencegah perembesan air lindi keluar zona TPA dengan menyediakan lapisan kedap, saluran drainase, kolam penampungan, dan unit pengolahan fisik, kimia, maupun biologis.

Konsep pengelolaan air lindi juga erat kaitannya dengan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi prasyarat teknis dalam pembangunan dan pengoperasian TPA. AMDAL menilai kapasitas TPA dalam menangani air lindi, termasuk potensi pencemaran, pola aliran, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Dengan

demikian, pengendalian air lindi tidak hanya merupakan kewajiban teknis, tetapi juga bagian dari pemenuhan standar keberlanjutan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka kebijakan publik, pengelolaan air lindi menjadi indikator penting dari efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Keberhasilan pengendalian air lindi bergantung pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, ketepatan teknologi yang digunakan, serta konsistensi pengawasan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan air lindi bukan hanya tanggung jawab teknis Dinas Lingkungan Hidup, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan air lindi pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga harus memperhatikan standar nasional maupun internasional mengenai perlindungan lingkungan. Di Indonesia, pengelolaan TPA mengacu pada SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan yang mengatur sistem *controlled landfill* dan *sanitary landfill* sebagai metode pemrosesan akhir sampah yang lebih aman bagi lingkungan.

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup secara internasional juga berkembang melalui penerapan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 yang menekankan pengendalian dampak lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip tersebut menekankan pentingnya pengendalian pencemaran, pengawasan kualitas lingkungan, serta mitigasi risiko terhadap masyarakat dan ekosistem.

Pengelolaan air lindi yang tidak memenuhi baku mutu berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan menunjukkan belum optimalnya sistem pengendalian lingkungan pada suatu TPA. Oleh karena itu, standar nasional dan internasional menjadi acuan penting dalam menilai pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2.5 Manajemen Risiko Lingkungan

Manajemen risiko lingkungan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat suatu aktivitas pembangunan maupun kegiatan operasional. Menurut Kolluru (1996), manajemen risiko lingkungan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya lingkungan, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian guna mengurangi dampak terhadap manusia dan lingkungan.

Pendekatan ini dilakukan agar potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dicegah sejak dini melalui pengawasan dan pengendalian yang terencana. Sementara itu, menurut Djajadiningrat (2005), manajemen risiko lingkungan merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan melalui identifikasi sumber pencemaran, penilaian dampak lingkungan, serta penyusunan langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan ini menjadi penting karena aktivitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah memiliki potensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat.

Risiko lingkungan dalam pengelolaan sampah dapat berupa pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, pencemaran udara akibat gas metana dan bau sampah, serta penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Salah satu risiko terbesar dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah keberadaan air lindi yang mengandung berbagai zat pencemar seperti amonia, logam berat, bakteri patogen, dan padatan tersuspensi.

Dalam konsep manajemen risiko, pengendalian terhadap air lindi harus dilakukan melalui identifikasi sumber pencemaran, penguatan sistem pengolahan lindi, pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, serta penyediaan fasilitas pengolahan yang memenuhi standar teknis.

Pengelolaan risiko juga mencakup langkah mitigasi untuk mencegah dampak pencemaran terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.

Dengan demikian, pengelolaan air lindi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis pengolahan limbah cair, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, konsep manajemen risiko lingkungan digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup merespons berbagai risiko lingkungan yang muncul akibat pengelolaan sampah di TPA Bakung, khususnya risiko pencemaran air lindi. Risiko tersebut menjadi stimulus yang memunculkan berbagai respons pemerintah berupa penerapan *controlled landfill*, pengangkutan sampah, pengawasan operasional TPA, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Namun, berbagai respons tersebut masih menghadapi kendala pada aspek teknis, sumber daya, dan koordinasi sehingga pengendalian risiko lingkungan belum berjalan optimal

2.6 Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah. DLH bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara struktural, DLH berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab langsung Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

DLH Kota Bandar Lampung diberikan mandat untuk menjalankan fungsi strategis yang meliputi urusan kebersihan, pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan, serta penataan ruang terbuka hijau. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang DLH ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang menempatkan DLH sebagai lembaga pelaksana kebijakan persampahan mulai dari tahap pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga penanganan akhir secara ramah lingkungan.

Di samping pelaksanaan fungsi teknisnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga berperan sebagai katalisator dalam pembentukan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kampanye pengelolaan sampah, penyelenggaraan pelatihan mengenai pemilahan sampah rumah tangga, serta pengembangan inisiatif berbasis komunitas seperti program bank sampah. Seluruh upaya tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan administratif semata, tetapi juga memperluas jangkauan kebijakan lingkungan hidup melalui pendekatan edukatif dan sosial yang inklusif.

DLH turut menyusun rencana strategis daerah di bidang lingkungan hidup, termasuk kewajiban pelaporan kinerja tahunan kepada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, DLH menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah secara nasional. Di samping itu, DLH juga membangun kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan kualitas implementasi program dan memperluas dampaknya.

1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah “Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing.” Visi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan di tengah dinamika perkembangan kota.

2. Misi

Untuk merealisasikan visi tersebut, DLH menetapkan misi yang mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; penyelenggaraan pelayanan umum yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup; pelaksanaan tugas-tugas tambahan sesuai dengan arahan Wali Kota; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan agar menjadi ruang yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi masyarakat serta ekosistem kota secara keseluruhan. Dengan cakupan peran yang luas dan komprehensif, DLH Kota Bandar Lampung menjadi pilar penting dalam implementasi kebijakan lingkungan daerah. Peran ini mencakup aspek teknis, sosial, edukatif, dan kolaboratif yang saling bersinergi untuk membentuk sistem pengelolaan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.

2.7 Kerangka Pemikiran

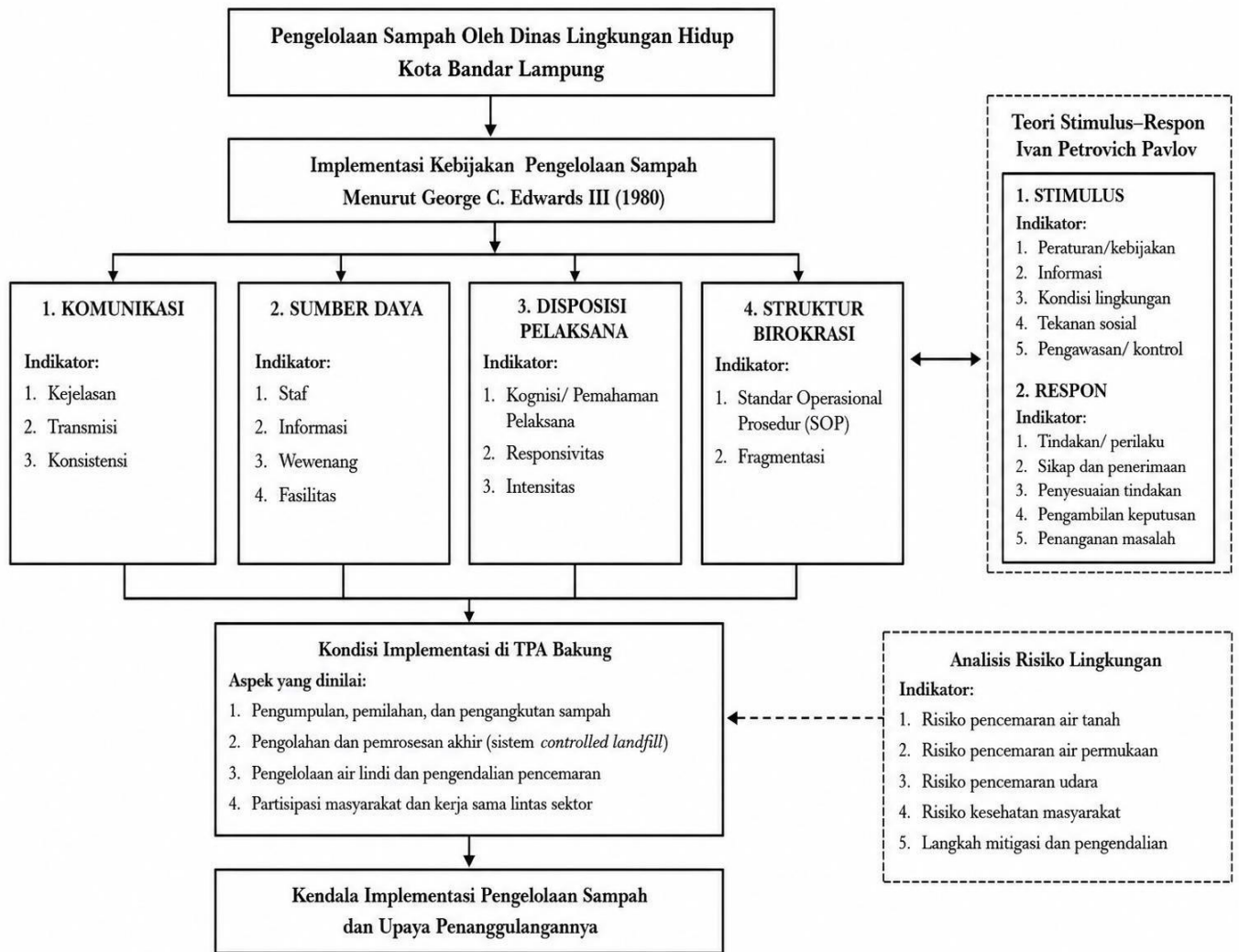
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai dasar untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori stimulus-respon Ivan Pavlov untuk melihat bagaimana aparat pemerintah, pengelola TPA, dan masyarakat memberikan respons terhadap berbagai stimulus kebijakan maupun tekanan lingkungan yang muncul akibat persoalan pengelolaan sampah dan air lindi

Komunikasi menjadi elemen penting dalam penyampaian informasi kebijakan, baik secara internal antar pelaksana maupun eksternal kepada masyarakat. Kualitas komunikasi menentukan efektivitas sosialisasi, koordinasi, dan penyebaran informasi publik terkait pengelolaan sampah. Sementara itu, ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, fasilitas, anggaran, dan informasi teknis berperan besar dalam mendukung kelancaran implementasi di lapangan.

Disposisi pelaksana mencerminkan sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki komitmen, motivasi, serta pemahaman terhadap tugas yang dijalankan. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kepedulian para pelaksana, baik dari DLH maupun mitra kerja lainnya. Di sisi lain, struktur birokrasi yang jelas, terutama dalam pembagian tugas dan keberadaan SOP, juga menjadi penentu efektivitas implementasi di lokasi seperti TPA Bakung.

Berangkat dari keempat variabel tersebut, kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung. Komunikasi diukur melalui efektivitas sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian informasi publik. Sumber daya dilihat dari ketersediaan tenaga kerja, sarana prasarana, anggaran, dan informasi teknis. Disposisi pelaksana dianalisis melalui tingkat komitmen, motivasi, pemahaman, dan kepedulian pelaksana. Sedangkan struktur birokrasi mencakup koordinasi lintas sektor, keberadaan SOP, dan sistem pembagian tugas. Seluruh variabel ini berkontribusi terhadap praktik pengelolaan sampah seperti kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penerapan sistem *controlled landfill*, serta kolaborasi antara DLH dan masyarakat sekitar TPA Bakung.

Selain menggunakan teori implementasi George C. Edwards III sebagai teori utama, penelitian ini juga menggunakan konsep manajemen risiko lingkungan dan teori stimulus-respon Ivan Pavlov sebagai pendekatan pendukung untuk melihat bagaimana pemerintah daerah merespons berbagai risiko lingkungan, tekanan sosial, dan kondisi pencemaran akibat pengelolaan sampah di TPA Bakung. Berbagai stimulus tersebut kemudian memunculkan respons pemerintah berupa pengangkutan sampah, penerapan *controlled landfill*, pengelolaan air lindi, dan pengawasan lingkungan. Namun, berbagai respons tersebut masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya, pengawasan, dan sistem pengendalian lingkungan sehingga implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kerangka Pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pikir.

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif-kritis untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta respons pemerintah daerah terhadap risiko lingkungan di TPA Bakung Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, dan aktivitas sosial yang terjadi secara alamiah, baik secara individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, Creswell (2015) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Penelitian ini dilakukan tanpa manipulasi terhadap variabel dan berupaya menangkap kenyataan sebagaimana adanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung yang berlokasi di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, mengingat TPA Bakung merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir di Kota Bandar Lampung yang menjadi titik utama implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Di lokasi inilah kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara langsung dan komprehensif.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai teori utama untuk menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan teori stimulus-respon Ivan Pavlov digunakan sebagai teori pendukung untuk melihat respons pemerintah daerah terhadap berbagai stimulus berupa regulasi, tekanan sosial, kondisi lingkungan, dan ancaman pencemaran di TPA Bakung.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumendokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023, laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup, dokumentasi kegiatan, dan arsip media massa serta Organisasi Masyarakat

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2017), data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari para pelaku di lapangan. Oleh karena itu, teknik triangulasi digunakan dalam pengumpulan data guna memperoleh keabsahan informasi dari berbagai sumber.

3.5 Informan Penelitian

Informan Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Informan terdiri atas pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, petugas lapangan TPA Bakung, serta tokoh masyarakat dan warga sekitar TPA. Pemilihan ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa informan adalah individu yang mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai topik yang sedang dikaji, baik karena keterlibatan langsung maupun kapasitasnya dalam memahami permasalahan. Dalam konteks penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung: Studi Kasus di TPA Bakung”, maka narasumber yang paling relevan adalah pejabat yang memiliki tugas langsung dalam pengelolaan sampah dan TPA Bakung. Dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa pejabat yang dipandang paling tepat untuk diwawancarai, yaitu:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Mahendra Jalyas, S.T., M.IP	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
2	Ahmad Junaidi, S.IP	Kepala UPT TPA Bakung
3	Sigit, S.E	Lurah Bakung
4	Suhar Timur Tono, S.KM	Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Bakung
5	Irfan Tri Musri	Direktur Walhi Lampung

6	Dr. Ofik Taufik Purwadi, S.T., M.T	Akademisi Teknik Lingkungan
7	Pale	Ketua Rw 03 Bakung
8	Syamsir	Ketua rt 01 Bakung/ketua bang sampah biru lestari

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Dengan komposisi ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, baik dari aspek kebijakan, teknis, maupun dampak sosial di lingkungan sekitar.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019), observasi digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, mendalam, serta untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi dalam suatu proses sosial atau organisasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara faktual dan objektif berdasarkan realitas empiris. Dalam penelitian kualitatif, observasi berperan penting untuk menangkap data yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara, sehingga membantu peneliti memahami konteks dan dinamika fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif.

3.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur. Menurut Sugiyono (2019), wawancara semi- terstruktur memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap berada dalam kerangka tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian ini dimulai sejak tanggal 02 Februari 2026 sampai dengan 09 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Februari 2026, peneliti mewawancarai Sigit selaku Lurah Kelurahan Bakung.
2. Pada tanggal 03 Februari 2026, peneliti mewawancarai Mahendra Jalyas selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
3. Pada tanggal 03 Februari 2026, peneliti mewawancarai Ahmad Junaidi selaku Kepala UPT TPA Bakung.
4. Pada tanggal 09 Februari 2026, peneliti mewawancarai Suhar Timur Tono selaku Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Bakung.
5. Pada tanggal 14 April 2026, peneliti mewawancarai Pale selaku ketua Ik 3 Kelurahan Bakung

6. Pada tanggal 14 April 2026, peneliti mewawancarai Syamsir selaku ketua Rt 01 Kelurahan Bakung
7. Pada tanggal 17 April 2026, peneliti mewawancarai Irfan Tri Musri selaku Direktur Walhi Lampung
8. Pada tanggal 22 April 2026, peneliti mewawancarai Ofik Taufik Purwadi selaku akademisi bidang teknik lingkungan Universitas Lampung

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Data yang diperoleh melalui dokumentasi akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh bukti pendukung, seperti foto, arsip resmi, media massa yang relevan. Oleh karena itu, teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat, memverifikasi, serta melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara agar hasil penelitian memiliki validitas dan keabsahan yang lebih baik.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan informasi yang relevan dari sejumlah besar data yang diperoleh selama penelitian. Informasi yang dianggap penting dipisahkan dari data yang tidak relevan, untuk kemudian difokuskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, deskripsi, atau matriks sederhana yang memudahkan pembaca untuk memahami keterkaitan antar variabel. Tujuannya adalah untuk menyusun data yang telah direduksi menjadi suatu kesatuan informasi yang utuh dan bermakna.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses analisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

3.8 Teknik Validasi Data

Validasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan adalah:

3.8.1 Kredibilitas

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi teknik dan sumber, serta *member check* kepada informan. Triangulasi membantu mengecek konsistensi data dari berbagai sumber, sementara *member check* digunakan untuk mengonfirmasi kembali hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.

3.8.2 Transferabilitas

Transferabilitas dicapai dengan cara menyajikan deskripsi yang kaya, mendalam, dan kontekstual, sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi atau lokasi lain yang memiliki karakteristik serupa.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung di TPA Bakung, khususnya dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan air lindi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Walaupun secara formal kebijakan telah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 dan beberapa kebijakan teknis DLH, pada level implementasi pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan koordinatif.

Berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa dokumen formal yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pedoman operasional yang jelas dan aplikatif bagi pelaksana di lapangan. Informasi yang diterima petugas pengelola masih bersifat umum dan lebih banyak bergantung pada pengarah lisan maupun kebiasaan kerja, sehingga konsistensi tindakan dalam pengelolaan air lindi belum berjalan secara maksimal.

Pada dimensi sumber daya, penelitian menemukan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana pendukung pengelolaan air lindi. Jumlah petugas pengelola TPA Bakung masih terbatas dan belum seluruhnya memiliki kompetensi teknis dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, fasilitas seperti kolam penampungan air lindi, pompa, drainase, alat berat, dan sistem pengolahan limbah cair masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingginya volume sampah harian yang masuk ke TPA Bakung. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan air lindi sangat rentan terhadap luapan limbah cair, terutama pada musim hujan.

Dalam dimensi disposisi, pelaksana kebijakan pada dasarnya bersikap patuh dan kooperatif terhadap kebijakan yang ada, namun implementasi pengendalian lingkungan masih menunjukkan pola yang reaktif. Penanganan air lindi umumnya dilakukan setelah muncul pencemaran, keluhan masyarakat, atau kondisi darurat di lapangan. Dalam perspektif teori stimulus-respon Ivan Pavlov, kondisi tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh stimulus berupa tekanan lingkungan dan sorotan publik, sehingga pengendalian lingkungan belum berjalan secara preventif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan dampak lingkungan TPA Bakung masih belum berjalan secara optimal. Fragmentasi kewenangan, lemahnya pengawasan lingkungan, serta belum adanya integrasi data antar instansi menyebabkan penanganan persoalan air lindi masih berjalan secara parsial dan administratif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan air lindi di TPA Bakung tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Berdasarkan dokumen perencanaan dan Laporan

Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program persampahan, menyediakan dukungan anggaran, serta menetapkan target pengurangan sampah melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Namun demikian, tingginya volume sampah yang masih masuk ke TPA Bakung menunjukkan bahwa implementasi konsep waste management dan penerapan 3R belum mampu mengurangi timbunan sampah secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan beban pengelolaan air lindi terus meningkat dan memperbesar risiko pencemaran lingkungan di sekitar TPA Bakung.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung masih belum mampu memenuhi standar pengendalian lingkungan secara optimal. Penerapan *controlled landfill* masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *sanitary landfill* sebagaimana standar pengelolaan TPA modern yang diatur dalam SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Selain itu, hasil uji laboratorium menunjukkan beberapa parameter air lindi masih melebihi baku mutu lingkungan, sehingga memperlihatkan bahwa pengolahan limbah cair belum berjalan secara maksimal.

Pengelolaan air lindi di TPA Bakung pada dasarnya telah dilakukan melalui sistem kolam penampungan dan pengolahan lindi yang tersedia di area TPA. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut belum mampu mengendalikan seluruh potensi pencemaran secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya luapan air lindi ke saluran drainase pada kondisi tertentu serta masih ditemukannya parameter kualitas air lindi yang melebihi baku mutu lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas pengolahan air lindi belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingginya volume sampah yang masuk ke TPA Bakung.

Implementasi konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di Kota Bandar Lampung juga masih belum efektif dalam mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA Bakung. Akibatnya, volume sampah terus meningkat dan berdampak pada meningkatnya produksi air lindi serta risiko pencemaran lingkungan terhadap drainase, tanah, dan lingkungan permukiman masyarakat sekitar.

Dampak sosial akibat pencemaran air lindi juga masih dirasakan masyarakat sekitar TPA Bakung, seperti munculnya bau menyengat, penurunan kenyamanan lingkungan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap risiko kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekitar TPA masih menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari belum optimalnya pengendalian lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung masih belum mampu mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif, preventif, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan masih lebih berorientasi pada penanganan operasional pengangkutan dan penumpukan sampah dibanding pengendalian risiko pencemaran lingkungan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut terlihat dari masih terjadinya pencemaran drainase akibat air lindi, belum optimalnya penerapan sanitary landfill, lemahnya pengawasan lingkungan, serta implementasi konsep 3R (reduce, reuse, recycle) yang masih belum mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Padahal secara nasional pengelolaan TPA seharusnya mengacu pada SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan yang menekankan penggunaan metode controlled landfill dan sanitary landfill sebagai sistem pengelolaan sampah yang lebih aman bagi lingkungan.

Selain itu, standar pengelolaan lingkungan internasional seperti ISO 14001 juga menekankan pentingnya sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi melalui pengendalian pencemaran, monitoring lingkungan secara berkala, mitigasi risiko, dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak lingkungan. Namun, kondisi di TPA Bakung menunjukkan bahwa sistem pengendalian lingkungan masih belum berjalan secara maksimal sehingga risiko pencemaran terhadap tanah, air, dan lingkungan permukiman masyarakat sekitar masih terus berlangsung hingga saat ini.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan air lindi di TPA Bakung masih cenderung bersifat administratif dan reaktif. Pemerintah daerah umumnya baru melakukan penanganan setelah muncul pencemaran, keluhan masyarakat, atau sorotan publik terhadap kondisi lingkungan TPA Bakung. Dalam perspektif teori stimulus–respon Ivan Pavlov, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa respons pemerintah masih dipengaruhi oleh stimulus berupa tekanan lingkungan dan kritik masyarakat, bukan berdasarkan sistem mitigasi risiko lingkungan yang terencana sejak awal.

Dari aspek teknologi pengelolaan lingkungan, TPA modern umumnya telah menggunakan leachate treatment plant (LTP) atau instalasi pengolahan air lindi, *geomembrane liner* untuk mencegah rembesan limbah cair ke tanah, sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor digital, serta pengolahan biologis dan filtrasi untuk menurunkan kadar pencemar sebelum air lindi dibuang ke lingkungan. Akan tetapi, pengelolaan air lindi di TPA Bakung masih lebih bergantung pada kolam penampungan dan penanganan operasional sederhana sehingga pengendalian pencemaran belum mampu berjalan secara optimal.

Selain itu, lemahnya implementasi konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih lebih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan

sampah ke TPA dibanding pengurangan timbunan sampah dari sumbernya. Kondisi tersebut menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPA Bakung terus meningkat dan berdampak pada meningkatnya produksi air lindi serta beban pencemaran lingkungan.

Jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan sampah di Jepang, pengendalian pencemaran dilakukan secara lebih ketat melalui disiplin pemilahan sampah, penerapan teknologi pengolahan limbah modern, pemanfaatan waste to energy, penggunaan sistem pengolahan air lindi terintegrasi, serta pengawasan lingkungan yang dilakukan secara berkala dan konsisten. Dengan sistem tersebut, risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan sejak awal sebelum menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, persoalan air lindi di TPA Bakung tidak hanya menunjukkan lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan, tetapi juga memperlihatkan belum kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung Kota Bandar Lampung, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung perlu memperkuat pengelolaan air lindi melalui peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan lindi, pemeliharaan kolam penampungan secara berkala, perbaikan sistem drainase, serta pengawasan kualitas air lindi secara rutin. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko luapan air lindi yang dapat mencemari drainase, tanah, dan lingkungan permukiman masyarakat sekitar TPA Bakung.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan TPA Bakung melalui pelatihan teknis pengelolaan air lindi, pengendalian pencemaran lingkungan, dan manajemen risiko lingkungan. Selain itu, penambahan jumlah petugas operasional perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan pengelolaan sampah dan pengawasan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.
3. pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran persampahan agar tidak hanya berfokus pada kegiatan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, tetapi juga diarahkan pada penguatan pengelolaan air lindi, peningkatan kapasitas fasilitas lingkungan, penguatan sumber daya manusia, dan pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan kualitas lingkungan di TPA Bakung.
4. implementasi prinsip *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R) perlu diperkuat melalui pengembangan TPS3R, peningkatan kapasitas bank sampah, penguatan sistem pemilahan sampah rumah tangga, edukasi masyarakat, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Upaya tersebut penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA

Bakung sehingga dapat menekan pembentukan air lindi dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mulai mengembangkan sistem *waste management* yang lebih terintegrasi dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern. Pengembangan *Material Recovery Facility* (MRF) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, sedangkan *Refuse Derived Fuel* (RDF) dapat digunakan untuk mengolah residu sampah menjadi bahan bakar alternatif. Pengembangan teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap TPA serta mengurangi volume sampah yang berpotensi menghasilkan air lindi.
6. pengelolaan TPA Bakung perlu ditingkatkan secara bertahap dari sistem controlled *landfill* menuju *sanitary landfill* sesuai standar pengelolaan TPA yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pengembangan *Leachate Treatment Plant* (LTP), penggunaan *geomembrane liner*, serta sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala guna memperkuat pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan TPA.
7. bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan sampah daerah, dampak kesehatan masyarakat akibat pencemaran air lindi, kualitas lingkungan di sekitar TPA, serta hubungan antara tata kelola persampahan dan keadilan lingkungan (*environmental justice*) menggunakan pendekatan yang lebih luas dan multidisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, A. M. I. T., Asfar, A. M. I. A., & Halamury, M. F. *Teori Behaviorisme (Theory of Behaviorism)*. Program Doktor Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2024. *Volume Timbulan Sampah Kota Bandar Lampung*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id>. Diakses pada 5 Oktober 2025, pukul 22.45 WIB.
- Berita Publik. 2024. *Surat Edaran: Pedoman Penting dalam Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung*. <https://beritapublik.id/pengelolaan-sampah-bandar-lampung>. Diakses pada 5 Oktober 2025, pukul 22.47 WIB.
- Birkland, T. A. 2019. *An Introduction To The Policy Process: Theories, Concepts, And Models Of Public Policy Making* (5th ed.). New York: Routledge.
- Creswell, J. W. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 2024. *SOP Pemilahan Sampah Rumah Tangga*. Dokumen internal.
- Grindle, M. S. 2017. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.
- Hardiana, S., Susanti, A., & Hamid, A. 2024. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu." *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(3), 73–80.
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Islamiati, D. 2024. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 748–760.

- International Organization for Standardization. 2015. *ISO 14001:2015 Environmental Management Systems Requirements with Guidance for Use*. Geneva: ISO.
- Jenkins, W. I. 1978. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. London: Martin Robertson.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.menlhk.go.id>. Diakses pada 5 Oktober 2025, pukul 22.49 WIB.
- Khotimah, N. 2024. *Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya*. Skripsi. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Konsentris.id & UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. 2025, 10 Januari. *Hasil Uji Laboratorium Air Lindi TPA Bakung*. Dokumen pengujian laboratorium.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2023. *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah*. Bandar Lampung: Pemkot Bandar Lampung.
- RMOL Lampung. 2025. *Retribusi Sampah Bandar Lampung Capai 45 Persen, DLH Optimistis Target Terpenuhi*. <https://rmollampung.id/retribusi-sampah-bandar-lampung-capai-45-persen-dlh-optimistis-target-terpenuhi>. Diakses pada 5 Maret 2026, pukul 13.00 WIB.
- SNI 19-2454-2002. 2002. *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Subianto, A. 2012. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi (Mengacu pada Teori George C. Edwards III)*. Yogyakarta: Brilliantan Imprint of MIC Publishing.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Umayasari, U., & Sandy, T. R. 2024. "Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung Provinsi Lampung: Studi Pasca Penutupan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan Sosial Politik dan Teknik Elektro serta Riset Terapan (JIPOSSTER)*, 3(4), 40–87.

- Widodo, J. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Prenada Media.
- Zahra, F., & Damanhuri, E. 2023. "Pengelolaan Air Lindi di TPA Indonesia: Kesenjangan Kapasitas Instalasi dan Pengawasan." *Jurnal Teknik Lingkungan*.